

**Efektivitas Pendidikan Pemilih Intrakurikuler Dalam Mata Pelajaran  
Sosiologi Untuk Membentuk Ketahanan Demokrasi  
(Studi Pada Siswa SMAN 7 Sekolah Penggerak, Kota Padang,  
Sumatra Barat)**

***Reno Fernandes***

Universitas Negeri Padang, Indonesia

email: [renofernandes@fis.unp.ac.id](mailto:renofernandes@fis.unp.ac.id)

***Azwar Ananda***

Universitas Negeri Padang, Indonesia

email: [ananda@fis.unp.ac.id](mailto:ananda@fis.unp.ac.id)

***Maria Montessori***

Universitas Negeri Padang, Indonesia

email: [mariamontessori@fis.unp.ac.id](mailto:mariamontessori@fis.unp.ac.id)

***Eka Vidya Putra***

Universitas Negeri Padang, Indonesia

email: [ekavidyaputra@fis.unp.ac.id](mailto:ekavidyaputra@fis.unp.ac.id)

***Monica Tiara***

Universitas Negeri Padang, Indonesia

email: [monicatiara@unp.ac.id](mailto:monicatiara@unp.ac.id)

Dikirim; 15-02-2023 Direvisi; 14-04-2023 Diterima; 26-04-2023

***ABSTRACT***

*This study aimed to evaluate the effectiveness of intra-curricular voter education in the Sociology lesson in high school on forming democratic resilience. Democratic resilience was assessed based on high school students' political literacy level.*

*The research employed descriptive quantitative; data collection techniques through observing student activities and political literacy questionnaires. The Normalized Gain Score was used to analyze the data in this study to see the significance of the difference in political literacy between the control and experimental groups.*

*The measurement results indicated a significant difference in political literacy between the experimental and control groups. The results indicated that intra-curricular voter education was an effective solution to ensure democratic resilience and shape a skilled and aware generation of voters. Consequently, this required more comprehensive support and implementation from the government and schools to guarantee the future of democracy in Indonesia.*

***Keywords: Intra-curricular Voter Education, Political Literacy, Democracy Resilience***

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan pemilih intrakurikuler dalam mata pelajaran Sosiologi dalam membentuk ketahanan demokrasi. Ketahanan demokrasi dapat dilihat dari tingkat literasi politik siswa di Sekolah Menengah Atas.

Metode penelitian yang digunakan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan aktivitas siswa dan angket literasi politik. *Normalized Gain Score* digunakan untuk menganalisis data penelitian ini untuk melihat signifikansi perbedaan literasi politik antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen.

Hasil pengukuran menunjukkan terdapat perbedaan literasi politik yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih intrakurikuler merupakan solusi yang efektif untuk memastikan ketahanan demokrasi dan membentuk generasi pemilih yang terampil dan sadar. Konsekuensinya, hal ini memerlukan dukungan dan implementasi yang lebih luas dari pemerintah dan sekolah dalam upaya memastikan masa depan demokrasi di Indonesia.

**Kata kunci:** Pendidikan Pemilih Intrakurikuler, Literasi Politik, Ketahanan Demokrasi

## PENGANTAR

Perkembangan teknologi informasi di abad 21 telah mempengaruhi praktik demokrasi dan membawa kemunculan demokrasi digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital memengaruhi proses politik dan partisipasi publik dalam membuat keputusan politik. Fokus utama dari demokrasi digital bukan pada pandangan demokrasi, tetapi lebih pada bagaimana media digital dapat memudahkan dan meningkatkan komunikasi politik. Hal ini membuka kesempatan bagi lebih banyak orang untuk mengakses informasi politik dan menyuarakan pendapat mereka dengan efektif, sehingga mengubah cara orang terlibat dalam proses politik (Iosifidis dan Nicoli, 2020).

Demokrasi digital merupakan isu penting dalam perkembangan demokrasi karena memberikan potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilihan, dan membantu dalam pencegahan kecurangan (Simon, dkk., 2017). Demokrasi digital juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, memperluas aksesibilitas pemilihan, dan meningkatkan efisiensi dalam proses pemilihan (Hindman,

2008). Namun demikian, demokrasi digital juga memiliki beberapa tantangan termasuk masalah privasi dan keamanan data, serta masalah aksesibilitas bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses internet atau keterampilan digital (Pagallo, 2019).

Pemilu yang dilaksanakan pada 17 April 2019 di Indonesia menjadi pengalaman penting dalam proses konsolidasi demokrasi pada era demokrasi digital. Pemilihan serentak ini untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Marzuki (2020) pada pemilu tersebut, teknologi digital dan media sosial telah dimanfaatkan secara masif oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Penelitian Zuhro (2019) mengungkapkan dinamika politik yang terjadi membawa perpecahan yang signifikan dalam struktur masyarakat. Masyarakat Indonesia terfragmentasi dalam dua kelompok yang selalu berdebat di media sosial bahkan dalam kehidupan nyata. Lebih lanjut menurut penelitian Sirait (2020) masifnya penyebaran berita bohong, kampanye hitam, dan ujaran kebencian yang berkaitan dengan politik identitas seperti suku, ras dan agama (SARA) yang difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi.

Kondisi seperti paparan di atas menyebabkan Indeks Demokrasi Indonesia menurun ke nilai terendah sepanjang sejarah. Hal ini dapat dilihat dari data The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2020, di mana Indeks Demokrasi Indonesia hanya menempati peringkat 64 dari 179 negara di dunia (Deutsche Welle, 2021). Data tersebut menunjukkan pergeseran dari demokrasi elektoral menjadi demokrasi cacat. Demokrasi elektoral adalah bentuk demokrasi di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara bebas dan adil. Sementara, demokrasi cacat adalah bentuk demokrasi yang memiliki banyak kekurangan dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya. Pada kondisi demokrasi cacat, terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam proses demokrasi yang mengakibatkan masyarakat tidak merasa diakomodasi dengan baik dalam proses pengambilan keputusan politik. Sehingga dapat memunculkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pada lembaga-lembaga pemerintahan (Simon dkk., 2017).

Idealnya dalam dinamika politik di Indonesia demokrasi digital dapat dimanfaatkan secara maksimal karena dalam daftar pemilih, pemilih muda merupakan kelompok mayoritas. Pada pemilu 2019 pemilih muda berjumlah kurang lebih 32 persen. Sementara pada pemilu 2024 diprediksi sebanyak 40-50 persen (Fernandes dkk., 2022). Namun, rendahnya literasi politik pemilih muda membuat masalah demokrasi Indonesia semakin kompleks. Betapa tidak, pemilu di Indonesia dihuni oleh dominan pemilih muda yang dapat dikategorikan sebagai *digital native* (Amri, dkk., 2019). Pemilih dengan kategori ini adalah mereka yang menguasai teknologi informasi. Generasi

ini menjadikan media sosial sebagai kebutuhan primer (Komariah dan Kartini, 2019).

Kebanyakan pemilih pemula di Indonesia memiliki akses internet yang tinggi. Mereka seringkali memperoleh banyak informasi politik, namun tidak memiliki kemampuan untuk memilah dan memfilter informasi yang benar dan berguna. Hal ini menyebabkan pemilih pemula rentan terhadap informasi yang tidak benar atau tidak bermanfaat (Ridha dan Riwarda, 2020). Pemilih pemula menjadi kelompok yang mudah di manipulasi (Juditha, 2018). Meskipun pemilih pemula memiliki jumlah yang banyak dan akses internet yang tinggi, namun mereka belum memiliki tingkat literasi politik yang cukup untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bijak dalam pemilu (Fitriyah, dkk., 2021).

Keberadaan pemilih muda yang dominan dan memiliki literasi politik yang rendah secara tidak langsung akan sangat berpengaruh kepada ketahanan demokrasi Indonesia. Ketahanan demokrasi merujuk pada kemampuan sistem demokrasi untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan kestabilan institusi politik dan hukum melalui pergantian pemerintah yang damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Boese, dkk, 2021). Faktor-faktor seperti partisipasi politik, kualitas institusi, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan kualitas media mempengaruhi ketahanan demokrasi (Lührmann, 2021). Demokrasi yang kuat dan stabil memerlukan partisipasi politik yang aktif dan berkualitas, institusi yang kuat dan independen, dan media yang bebas dan merdeka. Untuk mempertahankan dan memperkuat sistem demokrasi, semua pihak harus memiliki kesadaran dan komitmen (Merkel dan Lührmann, 2021).

Suatu kenyataan menurut Lührmann (2021) ketahanan demokrasi hanya akan

terbentuk jika sistem demokrasi yang kuat yang ditopang dengan literasi politik masyarakat. Dengan literasi politik yang baik masyarakat memiliki pengetahuan, nilai dan keterampilan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga tegaknya kehidupan yang demokratis dalam sebuah negara (Reichenbach, 2018). Untuk itu diperlukan upaya memperkuat literasi politik masyarakat terutama pemilih muda yang sebagaimana dibicarakan pada bagian atas merupakan kelompok dominan namun memiliki literasi politik yang rendah (Fernandes, dkk., 2022). Pendidikan politik merupakan hal yang paling penting dilaksanakan kepada pemilih pemula. Dengan pendidikan politik yang efektif dan efisien dapat memberikan literasi politik kepada pemilih pemula dan tentunya akan dapat membuat masyarakat semakin bisa memaknai demokrasi secara substantial bukannya hanya sekedar prosedural.

Banyak penelitian mengungkapkan salah satu formulasi mengelola pendidikan politik untuk pemilih muda yang paling efektif adalah melalui institusi pendidikan. Menurut (Keating dan Janmaat, 2016) pembahasan pemilu di ruang kelas atau menggunakan cara-cara praktis untuk menunjukkan pentingnya politik kepada siswa adalah cara yang menjanjikan untuk meningkatkan literasi dan minat politik pemilih muda. Penelitian (Howard dan Posler, 2012) menyatakan bahwa pendidikan pemilih untuk pemilih muda bisa diberikan melalui proses pelibatan mereka dalam kegiatan kampanye, debat presiden yang dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi. Penelitian (Dassonneville, dkk, 2012; Keating dan Janmaat, 2016; Ohme, dkk, 2020) menemukan bahwa pendidikan politik dapat dilaksanakan melalui Pendidikan kewarganegaraan di

sekolah. Selain itu penelitian (Fernandes, dkk, 2022) mengatakan pendidikan pemilih sejatinya dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan mata pelajaran yaitu dihadirkan secara intrakurikuler dalam pembelajaran di kelas.

Berbicara pendidikan politik melalui institusi pendidikan di Indonesia secara prinsip sebenarnya tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menjelaskan bahwa:

*“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan **menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab**”.*

Interpretasi pasal tersebut mengharapkan pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan potensi mereka agar dapat menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menjadi warga negara yang demokratis berarti aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Seperti yang dijelaskan oleh Huntington, partisipasi politik adalah ketika warga negara melakukan tindakan baik secara individu maupun dalam kelompok untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dalam negara demokratis. Oleh karena itu, pendidikan harus membantu siswa memahami pentingnya partisipasi politik dalam sebuah demokrasi dan memberi mereka keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut (Haq, dkk, 2020).

Dalam pelaksanaan pendidikan, tujuan pendidikan nasional akan menjadi pedoman dalam merancang kurikulum Pendidikan.

Tujuan tersebut akan tercermin dalam Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Oleh karena itu, pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional Indonesia harus diintegrasikan ke dalam mata pelajaran di Sekolah, terutama Sosiologi dan Pendidikan Kewarganegaraan (Amri, dkk, 2019).

Institusi pendidikan terutama pada tingkat Sekolah Menengah Atas merupakan tempat warga negara berusia 16 sampai 18 tahun atau *notabene* adalah pemilih muda menempuh pendidikan. Idealnya institusi pendidikan dapat mengoptimalkan pendidikan politik untuk siswanya. Namun pada kenyataan potensi ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pendidikan politik hanya diberikan secara terbatas kepada para siswa di Sekolah Menengah Atas. Pendidikan pemilih lebih cenderung diberikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk pertemuan seminar oleh Komisi Pemilihan Umum (Suryanef dan Rafni, 2020).

Secara khusus penelitian (Fernandes, dkk, 2022) mengungkapkan pendidikan politik di Sekolah dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan dengan pembelajaran Sosiologi pada tingkat pendidikan menengah atas terutama pada kelas XII. Mata pelajaran Sosiologi memiliki kompetensi dasar yang selaras dengan materi pendidikan pemilih. Tujuan pendidikan pemilih intrakurikuler agar terjadinya peningkatan literasi politik pemilih pemula. Lebih lanjut Fernandes (2022) menjelaskan dalam melaksanakan pendidikan politik intrakurikuler harus disajikan menggunakan model pembelajaran *student centered learning* dan mempersiapkan bahan ajar yang terintegrasi dengan pendidikan pemilih.

Penelitian ini ingin membuktikan efektivitas pendidikan pemilih intrakurikuler dalam meningkatkan literasi politik siswa sehingga berdampak pada ketahanan demokrasi. Penelitian ini mengambil fokus penelitian SMAN 7 Padang. Pemilihan lokasi penelitian tersebut karena SMAN 7 Padang merupakan salah satu sekolah yang menjalankan program sekolah penggerak yang merupakan program unggulan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan di Indonesia. Selain itu, SMAN 7 Padang merupakan satu-satunya sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka dengan Project Penguatan Profil Pancasila (P5) memilih tema Suara Demokrasi.

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data akan dikumpulkan melalui tes literasi politik. Efektivitas pendidikan pemilih intrakurikuler dilihat berdasarkan pengukuran literasi politik siswa. Pengukuran literasi politik siswa dilakukan kepada 2 kelas pada sekolah yaitu kelas uji coba dan kelas kontrol. Pengukuran literasi politik pada kelas uji coba dilakukan setelah pembelajaran Sosiologi dilaksanakan secara terintegrasi dengan pendidikan pemilih. Sementara pengukuran literasi politik tetap dilakukan pada kelas kontrol meskipun pendidikan pemilih tidak diterapkan pada kelas tersebut.

Data penelitian ini dilaksanakan dengan skema tindakan kelas dengan cara eksperimen. Proses penilaian efektivitas pendidikan pemilih intrakurikuler dilihat setelah diterapkannya pelaksanaan pembelajaran Sosiologi di SMAN 7 Padang sebanyak 4 kali pertemuan dengan menggunakan angket untuk melihat sikap dan keterampilan. Selanjutnya analisis data

dalam penelitian ini adalah untuk melihat tingkat perbedaan kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan perhitungan *Normalized Gain Score*.

## PEMBAHASAN

### Pendidikan Pemilih Intrakurikuler: Mata Pelajaran Sosiologi Terintegrasi Dengan Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari program pelajaran `sesuai dengan kurikulum di sekolah (Cords, dkk, 2012). Pendidikan pemilih intrakurikuler yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan pendidikan pemilih yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pendidikan pemilih dalam mata pelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam hal ini, mata pelajaran yang digunakan adalah mata pelajaran Sosiologi.

Mata pelajaran Sosiologi merupakan konsep, teori dan metode yang ada dalam ilmu Sosiologi yang dipilih untuk kepentingan pembelajaran di tingkat SMA (Amri, dkk, 2019). Mata pelajaran Sosiologi memiliki tujuan untuk (1). Menumbuhkan kesadaran peserta didik sebagai warga negara; (2). Menumbuhkan kepekaan terhadap keberlanjutan pembangunan, kelestarian lingkungan alam, dan masalah-masalah sosial; (3) meningkatkan kapasitas peserta didik untuk dapat melakukan pemberdayaan sosial (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,

2016). Selain itu, penguasaan pengetahuan Sosiologi dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial (Hawa dan Wardani, 2019). Adapun ruang lingkup kajian Sosiologi di SMA terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 tersebut memberikan gambaran tentang materi yang diajarkan dalam mata pelajaran Sosiologi di SMA. Materi tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu: Pada kelas X, siswa akan mempelajari tentang individu, kelompok, hubungan sosial, lembaga sosial, keanekaragaman sosial, penghargaan terhadap heterogenitas sosial, serta metode penelitian sosial; Pada kelas XI, materi yang diajarkan berkaitan dengan kelompok sosial, masalah sosial, konflik, kekerasan, perdamaian, dan penelitian sosial berorientasi pada pemecahan masalah. Materi ini bertujuan untuk mengajarkan siswa bagaimana mengenali dan menyelesaikan masalah sosial di masyarakat; Selanjutnya, pada kelas XII, materi yang diajarkan berfokus pada perubahan sosial, globalisasi, ketimpangan sosial, pemberdayaan masyarakat, penelitian sosial, kearifan lokal, dan pemberdayaan komunitas (Permendikbud Nomor 24, 2016).

Berdasarkan analisis kompetensi dasar Sosiologi di atas, Materi yang tercakup dalam Sosiologi meliputi berbagai struktur dan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Secara prinsip materi Sosiologi dapat menggabungkan data dari berbagai ilmu pengetahuan sebagai dasar pembelajarannya (Fernandes, 2022). Dalam konteks pendidikan

Tabel 1  
Ruang lingkup kajian Pelajaran Sosiologi dalam Struktur Kurikulum

Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
Individu, kelompok, hubungan sosial, pranata sosial, keragaman sosial, menghormati heterogenitas sosial, metode penelitian sosial	Kelompok sosial, masalah sosial, konflik, kekerasan, perdamaian, penelitian sosial untuk pemecahan masalah	Perubahan sosial, globalisasi, ketimpangan sosial, pemberdayaan masyarakat, penelitian sosial yang berorientasi pada pemberdayaan

Sumber: Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 Tentang Standar ISI

pemilih, Sosiologi dapat dihubungkan dengan fenomena demokrasi, pemilu, kelembagaan negara, partisipasi politik sepanjang kejadian itu memberikan keterangan beserta uraian proses berlangsungnya hidup kelompok sosial, nilai dan norma serta dinamika atau proses sosial yang dilalui manusia dalam masyarakat (Junaidi, dkk, 2020).

Dalam pelaksanaan pendidikan politik intrakurikuler prasyarat mutlak yang harus dipersiapkan adalah ketersediaan materi ajar yang terintegrasi (Amran dan Ananda, 2018). Untuk itu penelitian ini mengembangkan bahan ajar sosiologi yang terintegrasi dengan pendidikan. Proses pengembangan materi ajar dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model *integrated*. Model *integrated* adalah model yang dapat digunakan untuk mengaitkan beberapa aspek materi berupa konsep, nilai dan keterampilan dalam satu mata pelajaran tertentu atau antar mata pelajaran. Model *integrated* bertujuan agar peserta didik memperoleh nilai, pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Pembelajaran *integrated* dapat membuat pembelajaran menjadi bermakna (Fogarty, 2009). Model *integrated* merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik (Forbes dan Provenza, 2000). Model *integrated* terdiri dari 10 model dalam merencanakan pembelajaran terintegrasi, yaitu *fragmented, connected, nested, sequenced, shared, webbed, threaded, integrated, immersed, dan networked* (Fogarty, 2009).

Pembelajaran *integrated* dibedakan berdasarkan pola pengintegrasian materi atau tema. Pola integrasi materi pada model pembelajaran *integrated* dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pengintegrasian dalam

satu disiplin, beberapa disiplin ilmu yang berbeda, dan pengintegrasian di dalam satu atau beberapa disiplin ilmu. Dalam pengintegrasian dalam satu disiplin, pola ini mencakup penggabungan dua atau lebih bidang ilmu yang serumpun, seperti antara Sosiologi dengan ilmu politik dan Sejarah. Sedangkan, pada pengintegrasian beberapa disiplin ilmu yang berbeda, materi dari mata pelajaran yang tidak satu rumpun seperti Fisika dengan Sosiologi dapat digabungkan. Pola paling kompleks adalah pengintegrasian di dalam satu atau beberapa disiplin ilmu karena mencakup penggabungan antara disiplin ilmu yang serumpun sekaligus bidang ilmu yang berbeda. Dalam pola ini, integrasi materi dapat dilakukan di dalam satu disiplin ilmu atau beberapa disiplin ilmu, tergantung pada kebutuhan pembelajaran. Penting untuk memperhatikan pola integrasi materi dalam model pembelajaran *integrated* karena dapat membantu mengembangkan pemahaman yang lebih holistik dan menyeluruh pada siswa (Fogarty, 2009). Lebih lanjut, Trianto (2007) membuat klasifikasi antara model *integrated* dengan pola integrasi materi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Berdasarkan definisi model *integrated* yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memilih untuk menggunakan model *connected*. Model ini dipandang paling cocok untuk mengembangkan bahan ajar mata pelajaran Sosiologi dengan materi pendidikan pemilih. Model *connected* fokus pada pembuatan koneksi eksplisit dalam setiap bidang subjek, dan dapat digunakan untuk menghubungkan satu topik dengan topik lainnya, menghubungkan satu konsep ke konsep lainnya, dan menghubungkan satu keterampilan ke keterampilan terkait.

Dalam penelitian ini, koneksi dilakukan antara pendidikan politik dan mata

Tabel 2  
Klasifikasi Antara Model Integrated Dengan Pola Integrasi Materi

No.	Klasifikasi Pengintegrasian	Model Pembelajaran Integrated
1	Pengintegrasian dalam satu disiplin	<i>Connected Model, Nested Model, Cellular Model</i>
2	Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu yang berbeda	<i>Sequenced Model, Shared Model, Webbed Model, Threaded Model, Integrated Model</i>
3	Pengintegrasian di dalam satu atau beberapa disiplin ilmu	<i>Immersed Model, Networked Model</i>

Sumber: Trianto, 2007.

pelajaran Sosiologi yang merupakan ilmu sosial. Koneksi tersebut dapat dilakukan pada ranah nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan pada pendidikan politik dengan nilai, pengetahuan, dan keterampilan dalam mata pelajaran Sosiologi. Model *connected* memungkinkan peneliti untuk secara eksplisit menghubungkan kurikulum dalam disiplin, bukan hanya mengasumsikan bahwa peserta didik memahami koneksi secara otomatis. Oleh karena itu, model ini sangat relevan untuk dikembangkan dalam penelitian ini.

Konektivitas merupakan hal yang paling penting dan inti dalam model integrasi pembelajaran. Pandangan integrasi ini didasarkan pada gagasan ekologis tentang sifat yang saling berhubungan dan keterkaitan semua kehidupan (Leadbeater, 2021). Integrasi pembelajaran dapat membuat koneksi dan jaringan antara berbagai jenis pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Ini termasuk menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep inti, membuat hubungan antara aspek-aspek seperti teori dan praktik, domain disiplin dan profesional, serta di seluruh pengalaman yang diperoleh dalam berbagai konteks dan momen pengalaman yang mungkin tidak dianggap sebagai kesempatan belajar (Hooper, dkk, 2014)

Integrasi dalam bentuk koneksi dapat dilakukan lintas kurikulum, lintas konteks, lintas waktu, dan antara kehidupan akademik, keluarga, pekerjaan dan masyarakat diperlukan untuk membuat pembelajaran lebih bermakna

(Barber, 2012; Booth, dkk, 2011). Model *connected* mengakui bahwa belajar adalah inter kontekstual, tidak terbatas pada konteks tertentu, seperti ruang kelas akademik. Bahkan, pengalaman di berbagai konteks dan dalam berbagai peran menghubungkan ide, metode, dan minat yang berbeda untuk menetapkan keadaan yang lebih menguntungkan.

Integrasi *connected* memiliki tujuan untuk menghasilkan pemahaman baru dan pengetahuan baru. Integrasi pembelajaran dapat dianggap adaptif ketika unsur-unsur terhubung tanpa perubahan yang mendalam, dan transformatif (Kallio, 2011). Penciptaan pengetahuan baru terkait dengan kapasitas kompleks untuk mengakses teori dan pengetahuan prosedural yang relevan dan untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pengalaman individu di kelas dan di luar kelas untuk menciptakan pemahaman yang lebih disnergikan (Barber, 2012).

Dengan menghubungkan nilai, pengetahuan, dan keterampilan dalam topik tertentu, siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih kompleks dan mendalam. Selain itu, dengan waktu, konsep dan kompetensi kunci seperti metode ilmiah atau observasi dan kesimpulan dikembangkan untuk diinternalisasikan oleh siswa dengan lebih dalam. Tautan ide interdisipliner memungkinkan siswa untuk meninjau, memproses, dan mengasimilasi ide langkah demi langkah, dengan lebih banyak kesempatan



untuk memfasilitasi transfer pengetahuan (Fogarty, 2009).

Model *connected* sangat tepat dipakai untuk melakukan integrasi antara Pendidikan politik dengan mata pelajaran Sosiologi. Ide, konsep dan nilai-nilai dalam pendidikan politik dapat dihubungkan dengan konsep, nilai dan keterampilan pokok dalam mata pelajaran Sosiologi. Penerapan model *connected* pendidikan politik dengan Sosiologi membuat koneksi antara topik, konsep dan unit secara lebih eksplisit sehingga terbentuk pemahaman konsep, keterampilan serta nilai yang bisa didapatkan siswa dalam proses pembelajaran.

Konsep integrasi pada prinsipnya bagaimana menghubungkan dua pengalaman belajar berbeda dalam satu kegiatan pembelajaran (Fogarty, 2009). Pendidikan politik terintegrasi dengan mata pelajaran Sosiologi dapat membawa dampak baik untuk kedua komponen. Pemahaman konsep mata

pelajaran Sosiologi dapat dikuatkan dengan materi pendidikan politik yang mencakup demokrasi, kelembagaan negara, partisipasi politik dan Pemilu. Dengan menghadirkan materi pendidikan politik pada mata pelajaran Sosiologi maka dapat dikatakan pendidikan politik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sebagaimana yang telah dibicarakan pada bagian atas, ketersediaan materi ajar yang terintegrasi merupakan prasyarat mutlak dalam pelaksanaan pendidikan politik terintegrasi dengan mata pelajaran Sosiologi (Amran dan Ananda, 2018). Untuk itu penelitian ini mengembangkan bahan ajar sosiologi untuk kelas XII. Pengembangan bahan ajar dilakukan untuk 4 kali pertemuan pembelajaran Sosiologi. Adapun uraian materi dan proses pengintegrasian dengan materi pendidikan politik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3  
Integrasi Materi Pembelajaran Sosiologi Dengan Pendidikan Politik

No	Materi Pelajaran	Pendidikan Politik	Tujuan
1	<b>Pengertian Perubahan Sosial</b>	Sebagai stimulasi dalam menjelaskan pengertian perubahan sosial siswa diberikan artikel dan video tentang perubahan sistem politik di Indonesia dari era Orde Baru dan Reformasi dengan link berikut: <a href="https://youtu.be/4i3X0_E0jUE">https://youtu.be/4i3X0_E0jUE</a>	Melalui stimulasi dengan video pemahaman konsep siswa tentang pengertian perubahan sosial dapat didapatkan. Kemudian siswa akan mendapatkan informasi mengenai perubahan sistem politik, kelembagaan negara, partisipasi politik dan sejarah pemilu di Indonesia
2	<b>Bentuk perubahan sosial</b>	Dalam menjelaskan mengenai bentuk perubahan sosial akan ditampilkan video tentang pemilu sebagai perubahan sosial yang direncanakan sementara hoax merupakan contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan dengan link berikut: <a href="https://youtu.be/uFC2Wm1vi0s">https://youtu.be/uFC2Wm1vi0s</a>	Dengan memberikan stimulus yang demikian siswa dapat menemukan pemahaman konsep tentang perubahan sosial yang direncanakan sekaligus siswa mendapatkan pengetahuan tentang sistem pemilihan umum serentak 2019 dan 2014
3	<b>Faktor penyebab perubahan sosial</b>	Dalam melaksanakan pembelajaran materi faktor penyebab perubahan sosial diberikan stimulus kepada siswa berupa video tentang mekanisme penambahan kursi di DPR RI sebagai konsekuensi dari penambahan jumlah penduduk. <a href="https://youtu.be/MYmsn2Qg5zs">https://youtu.be/MYmsn2Qg5zs</a>	Pemahaman konsep tentang faktor penyebab perubahan sosial dapat terintegrasi dengan pengetahuan tentang kelembagaan negara yaitu peran dan fungsi DPR RI. Dengan demikian siswa juga dapat memahami peran dan fungsi pemilu.
4	<b>Sumber struktur perubahan sosial</b>	Pemahaman tentang sumber struktur perubahan sosial dapat di ajarkan dengan memberikan stimulus berupa video kebijakan pemerintah tentang <i>presidential threshold</i> <a href="https://youtu.be/r7_s7ctmBFY">https://youtu.be/r7_s7ctmBFY</a>	Pengetahuan tentang sumber struktur perubahan sosial dan pemahaman tentang sistem pemilihan umum dimiliki oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran

Sumber : Olahan Peneliti, 2022.

Berdasarkan Tabel 3 yang memuat contoh uraian materi mata pelajaran Sosiologi terintegrasi dengan pendidikan pemilih, maka dapat dikatakan mata pelajaran Sosiologi bisa *sinkron* dengan materi Pendidikan politik, dimana konsep dalam mata pelajaran Sosiologi dapat materi pendidikan pemilih. Berdasarkan buku panduan pendidikan politik yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengemukakan paling tidak seorang pemilih yang memiliki literasi politik harus menguasai pengetahuan, nilai dan keterampilan mengenai Demokrasi, Kelembagaan Negara, Pemilu dan Partisipasi Politik (KPU RI, 2015). Maksudnya secara pengetahuan para pemilih mengetahui konsep kunci mengenai politik kemudian pengetahuan tersebut menjadi nilai yang dianut oleh pemilih yang terlihat dari perilaku politik pemilih.

### **Peningkatan Literasi Politik Pendidikan Politik Intrakurikuler**

Literasi politik adalah seperangkat pengetahuan yang dapat membantu orang menjadi sadar akan fungsi dan perannya sebagai warga negara. Literasi politik tentang memberikan masyarakat kemampuan untuk membaca isu dan peristiwa politik. Selain itu dengan literasi politik masyarakat dapat menggunakan ide, bahasa, bentuk pemikiran, dan argumen yang digunakan ketika berhadapan dengan masalah publik (Wood, dkk, 2018). Literasi politik berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, dan pengertian seseorang tentang aktivitas yang berhubungan tentang politik.

Literasi politik dapat dicermati dalam dua bentuk tindakan. *Pertama*, bagaimana seseorang memaknai dan merespon (ide-ide, bahasa, bentuk-bentuk pikiran, dan argumen)

aktivitas yang berhubungan dengan politik; dan *kedua*, pengetahuan dan pengalaman seseorang diperoleh, dibentuk melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pengalaman. Maka pengetahuan dan pengalaman seseorang terhadap politik dipengaruhi oleh lingkungan politiknya (Carr, dkk., 2018). Literasi politik sebagaimana yang dijelaskan oleh Bernard Crick, (2000) adalah pemahaman praktis tentang pemahaman seputar isu utama politik. Literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap (Crick, 2000).

Lebih lanjut Bernard Crick, (2000) mengemukakan bahwa pengetahuan yang harus dimiliki oleh seseorang agar disebut memiliki literasi politik adalah berkaitan dengan informasi dasar tentang peranan dan fungsi kelembagaan negara seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan kelembagaan pemilu, memahami hakikat demokrasi, manfaat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pada tataran sikap, orang yang memiliki literasi politik adalah mereka yang mampu memiliki kebebasan, toleransi, keadilan, penghormatan terhadap kebenaran dan pemikiran. Sementara pada tataran keterampilan, literasi politik dapat terlihat dari partisipasi aktif seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti keikutsertaannya dalam memberikan suara dalam pemilihan umum (Crick, 2000).

Selanjutnya menurut Madhok (2005), ada empat indikator mengukur literasi politik, yaitu (1). Adanya kesadaran warga akan urgennya aktivitas politik dan mengetahui kewenangan, dan perannya dalam Lembaga politik; (2). Kapasitas warga negara untuk membentuk opini dan menentukan tempatnya dalam proses politik dengan tujuan tertentu; (3). Pengetahuan tentang kebijakan pemerintah,

perencanaan dan penganggaran pembangunan, dan pelayanan publik; (4). Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik seperti pemilihan umum.

Dari berbagai literatur, dapat diambil kesimpulan bahwa literasi politik menekankan tentang pengetahuan politik. Literasi politik adalah upaya memahami isu politik, ide utama atau visi yang dimiliki oleh para kontestan politik, dan bagaimana pola atau perilaku mereka dalam mempengaruhi masyarakat (Crick dan Heater, 2012; Heryanto, 2019). Jadi literasi politik sangat erat kaitannya pemahaman masyarakat mengenai politik dan aspek-aspek yang berhubungan dengan politik itu sendiri, seperti konsep negara; kekuasaan; pengambilan keputusan; kebijakan umum; dan alokasi (Putri, 2017). Namun, literasi politik tidak pula dipahami sebatas mengenai pengetahuan politik atau sekedar fungsi-fungsi institusi politik dan pemerintahan (Kus, 2015). Literasi politik berhubungan dengan pengetahuan dan nilai-nilai.

Menjadi warga negara yang memiliki literasi politik adalah mereka yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, termasuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengannya ataupun bagaimana cara untuk mengekspresikan diri mereka dalam kehidupan sehari-hari (Fyfe, 2007). Literasi politik merupakan sesuatu yang penting bagi pemilih dalam mengikuti proses pemilihan umum. Literasi politik pemilih merupakan kemampuan pemilih yang berkaitan pemahaman, keterampilan, dan perilaku untuk bersikap dan berpartisipasi dalam sebuah proses politik. Jika tingkat literasi politik masyarakat rendah maka proses politik akan dapat dimanipulasi dan didominasi oleh segelintir kelompok kepentingan. Sebaliknya jika masyarakat memiliki literasi politik yang

baik maka masyarakat akan menjadi otonom dan menentukan kedaulatan dirinya sendiri (KPU RI, 2015).

Penelitian mendapatkan data tentang ukuran literasi politik literasi di Sekolah Menengah Atas dan apakah terjadi peningkatan literasi politik siswa setelah dilaksanakan atau di ujicobakan pendidikan politik intrakurikuler melalui pembelajaran Sosiologi di SMA N 7 Padang. Untuk melihat peningkatan literasi politik tersebut artikel ini menggambarkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada saat pendidikan intrakurikuler dilaksanakan dan hasil uji tingkat literasi politik siswa melalui mekanisme *pretest* dan *posttest* menggunakan angket pengukuran literasi politik yang dikembangkan.

### **Aktivitas Siswa Yang Menunjukkan Memiliki Literasi Politik**

Tingkat literasi politik siswa dapat dilihat melalui aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran di kelas. Pengukuran ini dilakukan melalui pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sosiologi yang diintegrasikan dengan pendidikan politik. Literasi politik akan tercermin dari sikap siswa dalam proses pembelajaran seperti: menghargai kebebasan berpendapat, toleransi, menghormati pendapat orang lain. Selain sikap keterampilan yang menunjukkan literasi politik juga dapat dilihat melalui kegiatan siswa dalam pembelajaran seperti partisipasi siswa dalam diskusi, komunikasi efektif, bertanya, menyatakan pendapat dan kerjasama. Pengamatan aktivitas siswa ini dilakukan oleh dua orang pengamat pada 4 kali pelaksanaan pembelajaran Sosiologi. Adapun hasil pengamatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.

Berdasarkan data pengamatan yang dilakukan kepada siswa di SMAN 7 Padang

Tabel 4  
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

Aspek yang Diamati	Nilai Pengamatan			
	1	2	NA	
<b>Literasi Politik (Sikap)</b>				
1 Siswa menunjukkan sikap menghargai kebebasan berpendapat	4,6	4,2	88	Sangat Baik
2 Siswa menunjukkan sikap toleransi dalam berpendapat	4,4	4,6	90	Sangat Baik
3 Siswa menunjukkan sikap menghormati pendapat orang lain	4,8	4,4	92	Sangat Baik
4 Siswa menghormati kebenaran	4,6	4,6	92	Sangat Baik
<b>Literasi Politik (Keterampilan)</b>				
4 Siswa memperlihatkan partisipasi aktif dalam diskusi	4,8	4,8	96	Sangat Baik
5 Siswa mampu untuk berkomunikasi efektif dalam kelas	4,2	5	92	Sangat Baik
6 Siswa menunjukkan bertanya	4	5	90	Sangat Baik
7 Siswa menunjukkan keterampilan menyatakan pendapat	4,2	4,6	88	Sangat Baik
8 Siswa menunjukkan kemampuan dalam bekerjasama	4	4,4	84	Sangat Baik
<b>Rata - rata</b>	4,4	4,6	90	Sangat Baik

Sumber: Olahan Peneliti, 2022.

didapatkan data bahwa aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran Sosiologi terintegrasi dengan Pendidikan politik memiliki rata rata nilai 90 dengan kriteria sangat baik. Dengan demikian dapat dikatakan dari segi aktivitas siswa proses Pendidikan politik intrakurikuler di SMAN 7 Padang sangat efektif.

Data tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Sosiologi yang diintegrasikan dengan pendidikan pemilih memberikan dampak positif pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya literasi politik siswa dalam hal sikap dan keterampilan. Artinya, siswa akan memiliki sikap yang kritis, menghargai kebebasan berpendapat, toleransi, dan menghormati pendapat orang lain. Selain itu dari segi ketrampilan siswa memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam berpartisipasi pada proses pemilihan dan memahami pentingnya pendidikan pemilih bagi pembentukan masyarakat demokratis.

### Tingkat Literasi Politik Siswa

Selain melalui analisis aktivitas siswa dalam pembelajaran, efektivitas pendidikan politik intrakurikuler juga dilihat berdasarkan pengukuran literasi politik siswa. Literasi politik yang berkaitan dengan pengetahuan politik

siswa. Pengetahuan politik yang dimaksud lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5  
Materi Dan Cakupan Materi Pendidikan politik

Materi Pendidikan politik	Cakupan Materi Pendidikan politik
<b>Demokrasi</b>	Pengertian demokrasi, ciri ciri; kedudukan warga negara, hambatan pelaksanaan demokrasi, efektivitas demokrasi.
<b>Kelembagaan Negara</b>	Pengertian kelembagaan negara, cabang kekuasaan negara; kekuasaan konstitusi, tantangan kelembagaan negara; dan peran rakyat atas kelembagaan negara.
<b>Pemilu</b>	Pengertian pemilu, prinsip-prinsip, sistem pemilu, kelembagaan pemilu dan fungsinya, tahapan pemilu
<b>Partisipasi Pemilih</b>	pengertian partisipasi, fungsi, bentuk, periode masa pemilihan dan pasca pemilihan, tantangan partisipasi; dan mengefektifkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.

Sumber: PKPU No 10 tahun 2018

Pengukuran literasi politik siswa dilakukan kepada 2 kelas di SMAN 7 Padang yaitu kelas uji coba dan kelas kontrol dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan materi pendidikan pemilih yang dikeluarkan KPU RI diatas. Pengukuran literasi politik pada kelas uji coba dilakukan setelah pembelajaran Sosiologi dilaksanakan secara terintegrasi dengan

pendidikan politik. Untuk mendapatkan data yang baik. Pengukuran literasi politik digunakan dengan mekanisme pretest dan posttest pada kelas kontrol dan Uji coba. Adapun perbandingan hasil pengukuran literasi politik siswa dapat pada masing masing sekolah dapat dilihat dari hasil perhitungan *Normalized Gain Score* seperti pada Tabel 6.

Berdasarkan hasil perhitungan *Normalized Gain Score* di atas terlihat pada kelas eksperimen SMAN 7 Padang masing - masing memiliki nilai rata-rata *N-Gain* 0,71 yang artinya terjadi peningkatan literasi politik siswa yang pada kategori tinggi. Sementara literasi politik kelas kontrol juga mengalami peningkatan dengan angka dibawah *N-Gain* kelas eksperimen yaitu pada angka 0,55 dengan kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa integrasi pembelajaran Sosiologi dan pendidikan pemilihan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan literasi politik siswa. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya pendidikan politik intrakurikuler, siswa memperoleh pengetahuan yang lebih baik dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Peningkatan literasi politik siswa yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang hanya diajar dengan pembelajaran Sosiologi biasa membuktikan bahwa pendidikan politik intrakurikuler efektif dalam membentuk literasi politik siswa.

### **Pendidikan Pemilih Intrakurikuler Dan Ketahanan Demokrasi Di Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan pemilih intrakurikuler dapat

meningkatkan literasi politik siswa dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sebagaimana yang telah dibicarakan pada bagian diatas bahwa literasi politik siswa dapat terlihat pada pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran untuk melihat sikap dan keterampilan siswa dan pengukuran terhadap pengetahuan siswa yang berkaitan dengan literasi politik. Data memperlihatkan bahwa literasi politik dari segi sikap dan keterampilan dapat dikategorikan sangat baik. Begitu juga dari segi pengetahuan literasi politik siswa mengalami peningkatan ketika diberikan pendidikan politik secara intrakurikuler melalui mata pelajaran Sosiologi terintegrasi dengan pendidikan politik.

Berbicara mengenai literasi politik akan muncul ketika diberikan pendidikan politik kepada generasi muda yang efektif dan efisien. Dalam struktur masyarakat Indonesia tercatat pada pemilu 2019 pemilih muda berjumlah kurang lebih 32 persen. Sementara pada pemilu 2024 diprediksi sebanyak 40-50 persen (Fernandes, dkk, 2022). Jumlah pemilih muda yang mayoritas ini tentunya akan berdampak kepada kehidupan berbangsa dan bernegara yang dalam hal ini berkaitan dengan ketahanan demokrasi.

Ketahanan demokrasi adalah kemampuan suatu sistem demokrasi untuk bertahan dan mempertahankan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan dan hak asasi manusia, keterwakilan, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan sistem pemerintahan yang terbuka

Tabel 6  
Rata-rata literasi politik Siswa

Kelas	N	Rata-rata Pretest	Rata-rata Posttest	Rata-rata Gain (Δ)	Kategori Gain (Δ)
<i>Uji Coba</i>	25	55	81	0,71	Tinggi
<i>Kontrol</i>	28	55	64	0,55	Sedang

Sumber: Olahan Peneliti, 2022.

dan transparan (Boese, dkk, 2021). Dalam konteks ini, ketahanan demokrasi mengacu pada kemampuan sistem demokrasi untuk mempertahankan kestabilan dan kontinuitas institusi politik dan hukum melalui pergantian pemerintah yang damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Lührmann, 2021).

Ketahanan demokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti partisipasi politik, kualitas institusi, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan kualitas media. Demokrasi yang kuat dan stabil membutuhkan partisipasi politik yang aktif dan berkualitas dari warga negara, institusi yang kuat dan independen, dan sistem media yang bebas dan merdeka (Merkel dan Lührmann, 2021). Keberlangsungan dan kualitas demokrasi juga bergantung pada adanya kesadaran dan komitmen dari semua pihak untuk mempertahankan dan memperkuat sistem demokrasi (Asher, 2016).

Fenomena politik kontemporer yang terjadi di Indonesia pasca pemilu 2019 memberikan tantangan tersendiri bagi ketahanan demokrasi. Demokrasi kian menghadapi tantangan dari dalam, misalnya ketika para pemimpin politik tidak mau menghormati hasil pemilu atau menyerahkan kekuasaan secara damai, terjadinya polarisasi masyarakat keadaannya inilah yang menyebabkan kemunduran demokrasi (Sulastri, dkk, 2020). Sikap apatis pemilih dan ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga politik tradisional khususnya partai politik dan politisi membuat warga negara mencari jalur alternatif untuk dialog dan keterlibatan politik, yang didukung oleh teknologi baru (Hamonangan, 2020). Uang besar dalam politik dan kemampuannya membajak kebijakan negara dan memfasilitasi korupsi, merusak integritas sistem politik. Berdasarkan fenomena itulah, Indeks Demokrasi Indonesia menurun ke nilai

terendah dalam sejarah negara ini, menurut data The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2020, Indeks Demokrasi Indonesia berada pada peringkat 64 dari 179 negara di dunia. Data tersebut menunjukkan pergeseran dari demokrasi elektoral menjadi demokrasi cacat (Deutsche Welle, 2021).

Ketahanan demokrasi memegang peran penting dalam memastikan keberlangsungan dan stabilitas pemerintahan demokratis. Tanpa Ketahanan demokrasi, sistem demokrasi dapat terancam oleh berbagai ancaman, seperti kekuatan otoritarian, korupsi, diskriminasi, dan kebijakan yang tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi warga negara dan pemimpin untuk terus memperkuat dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi (Hamonangan, 2020). Salah satu jalan dalam menciptakan Ketahanan demokrasi adalah meningkatkan literasi politik warga dengan cara memberikan pendidikan politik kepada warga negara terutama kepada pemilih muda. Literasi politik merupakan memberikan pengetahuan tentang demokrasi dan hak-hak politik harus tersedia bagi seluruh warga negara untuk memastikan bahwa mereka memahami dan memiliki keterampilan untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Menurut Lührmann (2021) ketahanan demokrasi hanya akan terbentuk jika sistem demokrasi yang kuat yang ditopang dengan literasi politik masyarakat. Dengan literasi politik yang baik masyarakat memiliki pengetahuan, nilai dan keterampilan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga tegaknya kehidupan yang demokratis dalam sebuah negara (Reichenbach, 2018). Untuk itu diperlukan upaya memperkuat literasi politik masyarakat terutama pemilih muda yang sebagaimana dibicarakan pada bagian atas merupakan kelompok dominan namun memiliki

literasi politik yang rendah (Fernandes, dkk, 2022). Pendidikan politik merupakan hal yang paling penting dilaksanakan kepada pemilih pemula. Dengan pendidikan politik yang efektif dan efisien dapat memberikan literasi politik kepada pemilih pemula dan tentunya akan dapat membuat masyarakat semakin bisa memaknai demokrasi secara substantial bukan hanya sekedar prosedural.

Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa pendidikan pemilih dapat diselenggarakan secara efektif untuk meningkatkan literasi politik adalah pendidikan politik secara intrakurikuler. Pendidikan pemilih intrakurikuler dapat disajikan dengan pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan politik. Sebagaimana yang diujikan pada penelitian ini. Pendidikan politik intrakurikuler dapat dilaksanakan melalui mata pelajaran Sosiologi. Dalam mata pelajaran ini, siswa dapat belajar tentang berbagai aspek sosial dan politik, termasuk sistem politik, hak asasi manusia, dan mekanisme demokrasi.

Mata pelajaran Sosiologi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem politik dan sosial berfungsi dalam masyarakat, termasuk struktur dan proses politik serta peran serta masyarakat dalam proses politik. Ini dapat membantu siswa dalam memahami mekanisme demokrasi dan bagaimana ia berfungsi dalam masyarakat. Selain itu, dalam mata pelajaran Sosiologi juga dapat dibahas tentang perkembangan politik di Indonesia, termasuk perjalanan sejarah politik Indonesia dan permasalahan yang dihadapi saat ini. Ini dapat membantu siswa dalam memahami konteks politik di Indonesia dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sosiologi juga dapat memberikan analisis tentang perbedaan dalam pandangan

politik yang diperlihatkan oleh individu dan kelompok sosial, yang dapat membantu siswa dalam memahami perbedaan dalam pandangan politik yang ada di masyarakat dan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Secara keseluruhan, pendidikan politik intrakurikuler melalui mata pelajaran Sosiologi dapat memberikan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang aktif dan kritis. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan ketahanan demokrasi di Indonesia dengan menciptakan generasi warga negara yang literasi politik yang baik, aktif, kritis, toleran, dan memahami mekanisme demokrasi.

Pembelajaran Sosiologi yang diintegrasikan dengan pendidikan pemilihan membantu membentuk generasi muda yang memahami pentingnya hak politik dan sosial mereka sebagai warga negara. Literasi politik yang diterima melalui pembelajaran ini akan membuat siswa lebih memahami dan peduli terhadap masalah sosial dan politik yang terjadi di sekitarnya. Dengan literasi politik yang kuat, siswa akan lebih aktif dan tanggap dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti memilih pemimpin yang tepat, memahami isu-isu sosial dan politik, dan memberikan pendapat yang bijaksana. Literasi politik juga membantu siswa memahami dan menghargai hak-hak asasi manusia, toleransi, dan kebebasan berpendapat, yang merupakan fondasi dari masyarakat demokratis.

Secara keseluruhan, pembelajaran Sosiologi yang diintegrasikan dengan pendidikan pemilihan membantu membentuk generasi muda yang memahami dan peduli terhadap masalah sosial dan politik, dan memiliki keterampilan dan sikap yang baik dalam berpartisipasi dalam demokrasi. Ini

akan membantu membentuk masyarakat yang demokratis dan bermartabat di masa depan.

## SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

*Pertama*, pada era demokrasi digital untuk menjaga dan memperkuat ketahanan demokrasi, pendidikan pemilih intrakurikuler dapat menjadi salah satu solusi. Pendidikan politik intrakurikuler dapat dijadikan upaya meningkatkan literasi politik pemilih muda yang notabene adalah siswa Sekolah Menengah Atas. Pendidikan politik ini tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan politik, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan politik yang baik.

*Kedua*, literasi politik yang baik dan efektif dapat membantu mengurangi apatis pemilih, meningkatkan kesadaran dan komitmen warga negara terhadap sistem demokrasi, dan membentuk generasi muda yang memahami dan menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan literasi politik masyarakat semakin bisa memaknai demokrasi secara substantial bukan hanya sekedar prosedural. Keadaan tersebut yang dapat meningkatkan ketahanan demokrasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A., dan A. Ananda, 2018, Development of adaptive contextual teaching model of integrated science to improve digital age literacy on grade VIII students. *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 1116, No. 3, h. 32004.
- Amri, E., N. Susilawati, dan R. Fernandes, 2019, Integrating The Voter Education To School Subjects In Formal Education. *Proceeding Of The 1st International*

*Conference On Asean (IC-ASEAN)*, h. 464.

- Asher, H., 2016, *Polling and the public: What every citizen should know*. Cq Press.
- Barber, J. P., 2012, Integration of learning: A grounded theory analysis of college students' learning. *American Educational Research Journal*, Vol. 49, No. 3, hh. 590–617.
- Boese, V. A., A.B. Edgell, S. Hellmeier, S.F. Maerz, dan S.I. Lindberg, 2021, How democracies prevail: democratic resilience as a two-stage process. *Democratization*, Vol. 28, No. 5, hh. 885–907. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1891413>
- Booth, S., S. Peacock, dan S.P.Vickers, 2011, Plug and play learning application integration using IMS Learning Tools Interoperability. *Ascilite*, hh. 143–147.
- Carr, P. R., M. Hoechsmann, dan G. Thésée, 2018, *Democracy 2.0: Media, political literacy and critical engagement*, Brill.
- Cords, N., R. Fischer, M. Euler, dan A. Prasad, 2012, Teaching optics with an intra-curricular kit designed for inquiry-based learning. *Physics Education*, Vol. 47, No. 1, h. 69.
- Crick, B., 2000, *Essays on citizenship*, Continuum Studies in Citizenship.
- Crick, B., dan D.Heater, 2012, *Essays on political education*, Routledge.
- Dassonneville, R., E. Quintelier, M. Hooghe, dan E. Claes, 2012, The Relation Between Civic Education and Political Attitudes and Behavior: A Two-Year Panel Study Among Belgian Late Adolescents. *Applied Developmental Science*, Vol. 16, No. 3, hh. 140–150. <https://doi.org/10.1080/10888691.2012.695265>



- Deutsche Welle, 2021, *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir*. <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>
- Fernandes, R., 2022, *Model Pembelajaran Connected To Political Education (C-Pe) dalam Pembelajaran Sosiologi untuk Meningkatkan Literasi Politik Pemilih Pemula*, Universitas Negeri Padang.
- Fernandes, R., A. Ananda, dan M. Montessori, M., 2022, *Implementation of Intracurricular Political Education into Sociology Education for Young Voters*. Vol. 1, No. 43, hh. 8916–8927.
- Fitriyah, F., L.K. Alfirdaus, dan D.G. Manar, 2021, Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 12, No. 1, hh. 1–10. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10>
- Fogarty, R., 2009, *How to integrate the curricula* (Third), Corwin Press.
- Forbes, J. M., dan F.D. Provenza, 2000, Integration of learning and metabolic signals into a theory of dietary choice and food intake. *Ruminant Physiology: Digestion, Metabolism, Growth and Reproduction*, hh. 3–19.
- Fyfe, I., 2007, Hidden in the Curriculum: Political Literacy and Education for Citizenship. *Australia Melbourne Journal of Politics*, Vol. 32, hh. 110–134.
- Hamonangan, I., 2020, Pasar, Tata Kelola Dan Hubungan Transnasional Di Era Globalisasi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Dunia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26, No. 1, h. 55. <https://doi.org/10.22146/jkn.52695>
- Haq, R. S., dan A. Armawi, 2020, Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah., *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26, No. 3, hh. 399–420.
- Hawa, M., dan N.E.Wardani, 2019, The Implementation of Literary Sociology Learning Model with Contextual and Spiritual Quotient Approach to Teach Literary Sociology. *International Journal of Instruction*, Vol. 12, No. 1, hh. 283–298.
- Heryanto, G. G., dkk., 2019, *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. IRCiSoD.
- Hindman, M., 2008, The myth of digital democracy. In *The Myth of Digital Democracy*, Princeton University Press.
- Hooper, B. R., D. Greene, P.L. Sample, 2014, Exploring features of integrative teaching through a microanalysis of connection-making processes in a health sciences curriculum, *Advances in Health Sciences Education*, Vol. 19, No. 4, hh. 469–495.
- Howard, L. A., dan B.D. Posler, 2012, Reframing political messages: Using a festival to reach young voters. *Journal of Political Science Education*, Vol. 8, No. 4, hh. 389–407.
- Iosifidis, P., dan N. Nicoli, 2020, *Digital democracy, social media and disinformation*. Routledge.
- Juditha, C., 2018, Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya). *Pekommas*, Vol. 3, No. 1.
- Junaidi, Susilawati, N., R. Fernandes, I. Sylvia, dan E.V. Putra, 2020, *Integration of Al-Quran Education and Minangkabau*

- Culture on Subjects in Formal Schooling*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200217.029>
- Kallio, E., 2011, Integrative thinking is the key: An evaluation of current research into the development of adult thinking. *Theory & Psychology*, Vol. 21, No. 6, hh. 785–801.
- Keating, A., dan J.G. Janmaat, 2016, Education through citizenship at school: Do school activities have a lasting impact on youth political engagement? *Parliamentary Affairs*, Vol. 69, No. 2, hh. 409–429. <https://doi.org/10.1093/pa/gsv017>
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, *Materi Pokok Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013*.
- Komariah, K., dan D.S. Kartini, 2019, Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milenial dalam Pemilu. *Aristo*, Vol. 7, No. 2, h. 228. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i2.1608>
- KPU RI, 2015, *Pedoman Pendidikan Pemilih* (S. Joyowardono & T. P. W. Ningsih (eds.)). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)
- Kus, Z., (2015, Political Literacy Status of Pre-Service Social Studies Teacher. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 177 (July 2014), hh. 197–202. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.383>.
- Leadbeater, D., 2021, What is integration of learning? *Teaching in Higher Education*, Vol. 26, No. 1, hh. 1–19.
- Lührmann, A., 2021, Disrupting the autocratization sequence: towards democratic resilience. *Democratization*, Vol. 28, No. 5, hh. 1017–1039. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1928080>
- Madhok, S., 2005, Autonomy, political literacy and the social woman: Towards a politics of inclusion. *Rethinking Indian Political Institutions*, hh. 151–168. <https://doi.org/10.7135/UPO9781843317524.009>
- Marzuki, A. A. A., 2020, Penguatan demokrasi cyber di Indonesia pasca pemilu 2019. *Masyarakat Indonesia*, Vol. 45, No. 1, hh. 33–46.
- Merkel, W., dan A. Lührmann, 2021, Resilience of democracies: responses to illiberal and authoritarian challenges. *Democratization*, Vol. 28, No. 5, hh. 869–884. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1928081>
- Ohme, J., F. Marquart, dan Kristensen, 2020, School lessons, social media and political events in a get-out-the-vote campaign: successful drivers of political engagement among youth? *Journal of Youth Studies*, Vol. 23, No. 7, hh. 886–908.
- Pagallo, U., 2019, The Challenges of Digital Democracy, and How to Tackle Them in the Information Era. In *On the Cognitive, Ethical, and Scientific Dimensions of Artificial Intelligence*, hh. 385–393, Springer.
- Permendikbud Nomor 21, Pub. L. No. 21 Tahun 2016 Tentang Standart ISI.
- Permendikbud Nomor 24, 2016, [https://doi.org/10.1016/0921-4534\(89\)90112-3](https://doi.org/10.1016/0921-4534(89)90112-3)
- PKPU RI No 10 Tahun 2018, Pub. L. No. 10.
- Putri, N. E., 2017, Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, Vol. 5, No. 1. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.219>
- Reichenbach, R., 2018, Political Literacy: The State and Education. In *International*

- Handbook of Philosophy of Education*, hh. 1429–1445, Springer.
- Ridha, M., dan A. Riwanda, 2020, Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, hh. 110–121.
- Simon, J., T.Bass, V. Boelman, dan G. Mulgan, 2017, Digital democracy. *The Tools Transforming Political Engagement*. UK: Nesta, Jan.
- Sirait, F. E. T., 2020, Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia). *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 2, hh. 179–190.
- Sulastri, E., E.P. Purnomo, A. Setiawan, A.T. Fathani, dan C. Oktiawan, 2020, Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26, No. 3, h. 308. <https://doi.org/10.22146/jkn.61152>
- Suryanef, S., dan A. Rafni, 2020, First-Time Voter Education Through the Democracy Volunteer Movement. *Journal of Moral and Civic Education*, Vol. 4, No. 2, hh. 60–68. <https://doi.org/10.24036/8851412422020499>
- Trianto, 2007, *Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wood, B., R. Bolstad, R. Atkins, A. Milligan, dan M. Perreau, 2018, Civics, Citizenship and Political Literacy in The New Zealand Curriculum and Te Marautanga o Aotearoa. *Our Civic Future*, h. 10.
- Zuhro, R. S., 2019, Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 1, hh. 69–81.